

# DAMPAK ALIRAN MODAL ASING BAGI NEGARA- NEGARA BERKEMBANG:

## Proses 'Perbaikan' atukah 'Pemburukan' bagi Neraca Pembayaran

Didit Purnomo

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta

### Abstract

*Generally, foreign capital invested in developing countries function as externally additional capital resources in order to accelerate investment and economical growth, and also to mobilize capital as well as to transform economical structure. In this article, the writer discusses many impacts as a logical consequence of foreign capital inflows in some developing countries, including low income countries. Here, much discussion is talking about pros and cons arguments related to foreign capital inflows. The writer views that the abundance of foreign capital inflows in some developing countries mostly brings to negative impacts (from the view of balance sheet). To support his argument, the writer also put a "trivia hypothesis" such as: tightening rules about foreign capital inflows to make budget deficit not getting worse, reducing the structure of industrial sectors consisting many industrial sub sectors which is producing high-value added product and non-resources-based products and also not opening opportunity to posses as much 100 % for foreign investors.*

**Keywords:** *Foreign capital inflows, current account deficit, capital repatriation, foreign direct investment, foreign aid, saving-investment gap*

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Pengalaman di negara-negara berkembang (termasuk negara-negara yang berpenghasilan rendah/ *low income countries*) menunjukkan bahwa seringkali terjadi kesenjangan investasi-tabungan dan kesenjangan devisa yang dicerminkan dalam defisit anggaran. Umumnya

untuk menutup kesenjangan-kesenjangan tersebut, kebanyakan dari negara berkembang akan menutupnya dengan mengundang modal asing (*foreign capital inflows*).

Harapan bagi negara-negara berkembang atas peranan modal asing yang masuk ke negaranya adalah sebagaimana yang ditulis Mudrajad (1997), yang disitir dari Chenery dan Carter (1973, p.456-468), yaitu: *pertama*, sumber dana eksternal (*foreign capital*) dapat dimanfaatkan oleh negara berkembang sebagai dasar untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi; *kedua*, pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti dengan perubahan struktur produksi dan perdagangan; *ketiga*, modal asing dapat berperan penting dalam mobilisasi dana maupun transformasi struktural; *keempat*, kebutuhan akan modal asing menjadi menurun setelah perubahan struktural benar-benar terjadi.

Hal di atas menjelaskan fungsi produksi Neo-Klasik yang menggambarkan bagaimana pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh akumulasi faktor-faktor produksi, seperti modal dan tenaga kerja. Secara empiris oleh Stoneman (1975:p.11-26); Dowling dan Hiemenz, (1983) diindikasikan bahwa arus masuk modal asing telah menimbulkan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di NSB di kawasan Asia dan Pasifik. Begitu pula oleh Papanek (1972: 936) yang mengemukakan bahwa setiap satu dollar modal asing akan mengakibatkan kenaikan satu dollar impor dan investasi, sehingga dimungkinkan untuk menghitung dampak modal asing yang masuk terhadap pertumbuhan ekonomi (Mudrajad, 1997).

Akan tetapi 'hipotesis' tersebut sangat bertolak belakang dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sritua Arief yang mengatakan: "komponen yang paling bertanggung jawab dalam menimbulkan defisit transaksi berjalan (*current account*) adalah keuntungan investasi asing yang direpatriasi ke luar negeri (negara asal)". Untuk kasus di Indonesia, dalam kurun waktu 1973-1990 diketahui dampak negatif atas masuknya modal asing sebesar sepuluh kali lipat (Sritua Arief, 1993).

Artikel ini mencoba menetengahkan berbagai dampak yang diakibatkan oleh masuknya aliran modal asing (*foreign capital inflows*) di negara-negara berkembang, termasuk *low-income countries*. Akan dikemukakan pula argumen-argumen yang mendukung, baik

argumen pro dan kontra terhadap arus modal asing yang masuk ke negara-negara berkembang.

## PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG

Secara umum, kebanyakan negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia mempunyai struktur pembiayaan pembangunan sebagai berikut:

*Pertama*, mengutamakan potensi sumber pembiayaan yang berasal dari dalam negeri, atau sering disebut 'Tabungan Domestik'. Akan tetapi dilema yang harus dihadapi oleh hampir semua negara berkembang dan juga *low-income countries* adalah kenyataan bahwa tidak tercukupinya tabungan domestik (dalam negeri) untuk membiayai pembangunan (pertumbuhan ekonomi)-nya.

*Kedua*, potensi sumber-sumber keuangan dari luar negeri. Atau sering disebut '*International Financial Resource*' (Purnomo, 1999). Dalam artikel ini sengaja tidak dibahas masalah *Domestic Saving*. Tulisan yang disajikan akan mengkhususkan permasalahan tentang arus sumber keuangan internasional sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di negara-negara berkembang.

### Arus Sumber Keuangan Internasional

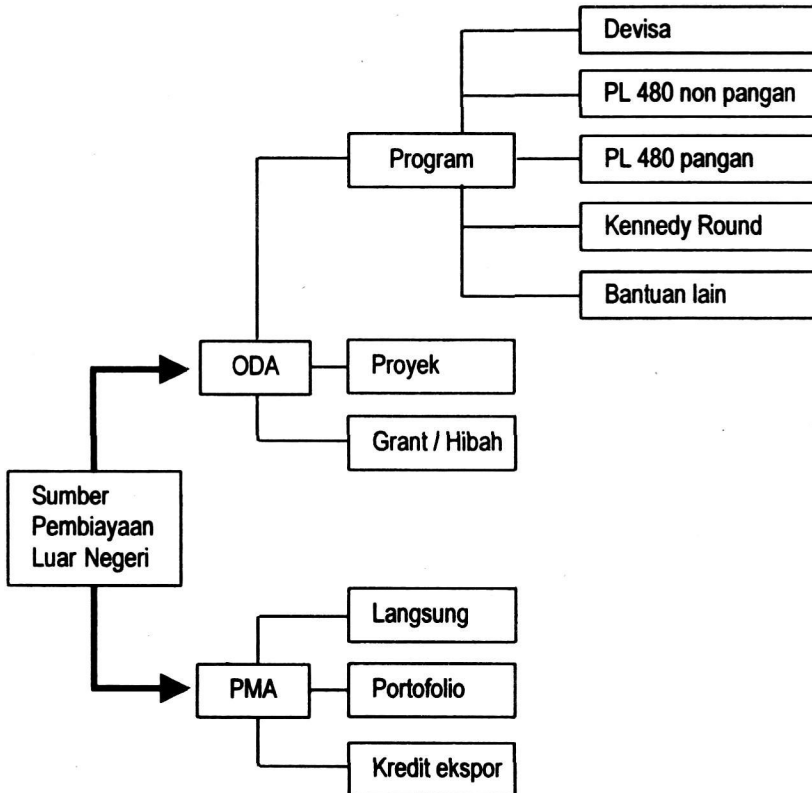
Wujud dari arus sumber-sumber keuangan internasional terbagi dalam dua bentuk, yaitu:

1. Bantuan Pembangunan Resmi Pemerintah (*Public Development Assistance*), sering disebut *Foreign Aid*. Jenis dari *foreign aid* bisa bersifat multilateral, di mana sebagai perantaranya adalah lembaga-lembaga keuangan internasional pemberi dana (donor). yang bersifat bilateral, di mana sebagai donornya adalah lembaga-lembaga independen, seperti contohnya adalah Consultative Group for Indonesian (CGI), yang merupakan lembaga keuangan sebagai wakil dari negara Jepang untuk Indonesia (sebagai pengganti IGGI dahulu), serta munculnya lembaga-lembaga swadaya masyarakat internasional (NGO, *non-governmental organization*). (Todaro, 1998 dan Rachbini, 2001).
2. Penanaman modal asing yang dilakukan oleh pihak swasta (*private foreign investment*), terutama berupa PMA yang bersifat langsung (*foreign direct investment*), yang biasanya dilakukan

oleh perusahaan-perusahaan raksasa multinasional. Selain itu berupa PMA yang bersifat tidak langsung, yang biasanya arus permodalan tersebut berasal dari bank-bank swasta internasional. Bentuk dari PMA yang tidak langsung berupa *portfolio investment*, yaitu diinvestasikan pada berbagai instrumen keuangan, seperti: saham, obligasi, sertifikat deposito, surat promes investasi, dan sebagainya (Todaro, 1998).

Seperti ditulis oleh Suseno (1990) dalam bukunya, *Indikator Ekonomi*, di mana secara visual arus sumber keuangan internasional diperlihatkan dalam skema 1, yang menggambarkan tentang sumber pembiayaan luar negeri.

**Skema 1. Sumber Pembiayaan Luar Negeri**



Hal senada juga dikemukakan oleh Yasuhiko Torri (1987), bahwa untuk aliran swasta mencakup penanaman modal langsung, penanaman modal portfolio dan kredit ekspor swasta. Tapi Yasuhiko menggolongkan pembiayaan resmi dibagi menjadi dua, yaitu *Official Development Assistance* dan *Other Official Finance* (diambil dari BUSINESS NEWS 15-6-1987, P.4C yang disitir oleh Suseno, 1990)

### **PERKEMBANGAN BANTUAN LUAR NEGERI (FINANCIAL AID) DI NSB**

Pada prinsipnya, semua transfer sumber daya riil dari suatu negara ke negara lain bisa dikatakan sebagai bantuan luar negeri. Akan tetapi dalam perkembangannya muncul banyak masalah, seperti: adanya praktek transfer sumberdaya yang terselubung. Sebagai contoh adalah pemberian *tarif preferensial*, di mana tarif diberikan lebih rendah daripada tarif rata-rata sebenarnya oleh negara maju bagi ekspor produk manufaktur dari negara-negara berkembang.

Sehingga, sejalan dengan perkembangan tersebut, setiap bantuan luar negeri sebagai arus permodalan ke negara berkembang harus memenuhi dua syarat pokok, yaitu: *Satu*, tujuan pemilik dana (negara donor) dalam memberikannya tidak bersifat komersial. *Kedua*, mengandung **syarat-syarat konsesional**, yakni suku bunga dan periode pengembaliannya harus lebih lunak. Lebih jelasnya, tingkat bunga yang lebih rendah dan masa pengembalian yang lebih lama dibanding pinjaman komersial pada umumnya (Todaro, 1998: 162).

Namun ada suatu fenomena menarik mengenai alokasi dari *foreign aid* ini, khususnya arus bantuan publik (*official development assistance*, ODA). Secara geografis-regional, kawasan Asia Selatan yang dihuni hampir 50 % penduduk termiskin di dunia, hanya menerima ODA sebesar US\$ 5 per-kapita dibanding kawasan Timur Tengah yang pendapatan per-kapitanya 3 kali lipat, justru menerima ODA hingga 11 kali lipat lebih besar, sekitar US\$ 55 per-kapita (lihat tabel 1). Tidak menutup kemungkinan bahwa hal ini dikarenakan motivasi dari pihak 'para Donor' yang memberikan bantuan, baik motivasi politik maupun motivasi ekonomis.

**Tabel 1. Penerimaan Bantuan Resmi Pembangunan (ODA) Per Kawasan, 1990**

Kawasan	ODA / kapita (US\$)	GNP/kapita (US\$)	Prosentase A thd B
	A	B	C
Negara-negara Arab	43	1.887	2,3
Afrika Sub-Sahara	32	475	6,7
Amerika Latin dan Karibia	10	1.962	0,5
Asia Timur dan Tenggara	5	625	0,8
Asia Selatan	5	458	1,1

Sumber: *United Nations Development Program (UNDP), Human Development Report, 1992 (New York: Oxford Univ. Press)*, diambil dari Todaro, 1998, p.165

Berdasar *report* dari UNDP, 1992 dikemukakan bahwa dari 20 negara penerima ODA terbesar tahun 1990 adalah Mesir, tetapi bila dilihat dari besarnya prosentase ODA terhadap GNP dari masing-masing negara tersebut Mozambik-lah yang terbesar (lihat tabel 2).

**Tabel 2. 20 Negara Berkembang Penerima Bantuan Resmi (ODA), 1990**

Negara Berkembang	Total ODA yang telah Diterima (US\$ juta)	Prosentase ODA terhadap GNP (%)
Mesir	5.584	17,2
Bangladesh	2.081	10,5
China	2.064	0,5
Indonesia	1.717	2,0
India	1.550	0,5
Philipina	1.266	3,0
Turki	1.259	1,7
Tanzania	1.155	37,5
Pakistan	1.108	2,8
Kenya	989	11,3
Maroko	965	4,4
Mozambik	923	77,4
Yordania	884	16,7
Ethiopia	871	14,6
Zaire	816	9,2
Thailand	787	1,2
Sudan	768	9,5

Lanjutan Tabel 2...

Negara Berkembang	Total ODA yang telah Diterima (US\$ juta)	Prosentase ODA terhadap GNP (%)
Senegal	724	15,4
Pantai Gading	674	7,2
Srilangka	659	9,1
<b>Sub-Total (61% total ODA)</b>	<b>26.844</b>	<b>2,4</b>

Sumber: *United Nations Development Program (UNDP), Human Development Report, 1992 (New York: Oxford Univ. Press)*, diambil dari Todaro, 1998, p.166

Untuk kasus di Indonesia, perkembangan jumlah yang semakin membesar berimplikasi terhadap jumlah pembayarannya. Bila diamati lebih seksama, jumlah pembayaran bunga hutang yang dibayarkan per tahun relatif besar, karena jumlahnya mendekati jumlah pembayaran cicilan pokok utang (tabel 3). Sehingga 'rontok-lah' istilah "*utang adalah bantuan yang berdimensi kemanusiaan*". Beban yang demikian berat itu justru merapuhkan sistem fiskal dan perekonomian (Rachbini, 2001).

Tabel 3. Pembayaran Pokok dan Bunga ULN Pemerintah dan BUMN (US\$ juta)

Tahun	Cicilan Pokok	Cicilan Bunga	Jumlah
1980	939	823	1.762
1981	1.054	991	2.045
1982	1.104	1.132	2.236
1983	1.290	1.233	2.523
1984	1.600	1.629	3.229
1985	2.330	1.634	3.973
1986	2.622	2.072	4.694
1987	3.406	2.273	5.679
1988	4.439	2.526	6.965
1989	4.217	2.802	7.019
1990	4.352	2.879	7.231
1991	4.673	2.896	7.569
1992	5.182	2.932	8.114
1993	5.706	3.160	8.866
1994	5.609	3.184	8.793
1995	6.007	3.684	9.691
1996	7.917	3.053	10.970

Lanjutan Tabel 3. ...

Tahun	Cicilan Pokok	Cicilan Bunga	Jumlah
1997	5.634	2.861	8.225
1998	4.263	2.953	7.216
1999	4.486	3.630	8.116
<b>Jumlah</b>	<b>76.560</b>	<b>48.356</b>	<b>124.916</b>

Sumber: Bank Indonesia, 2000

Dampak bantuan luar negeri tidak sepenuhnya positif, dalam arti 'membawa kesuksesan' bagi negara penerima bantuan telah banyak diteliti oleh berbagai pihak. Riset Cassen & Associates (1987), mengemukakan bahwa dampak dari ULN ternyata memberikan kesuksesan bagi perekonomian negara yang dihutangi, namun hasil riset Krueger pada tahun yang sama memberikan hipotesis yang sebaliknya, yaitu ULN lebih memberikan pengaruh yang merusak bagi perekonomian negara pengutang (Eaton, 1989).

Lebih lanjut Eaton (1989) menjelaskan, ada dua efek yang dihasilkan dari bantuan LN, yakni: *satu*, **efek mikro**, di mana tujuan utama pada proyek-proyek ULN di negara-negara yang bersangkutan (NSB) adalah untuk mendapatkan *rate of return* (hasil). Hasil riset Krueger (1987) yang dikutip Eaton menerangkan World Bank mempunyai target tingkat pengembalian sebesar 10% dari ULN yang dikucurkan. *Kedua*, **efek makro**, yakni perlu diketahuinya 4 aspek untuk mengetahui pengaruh secara umum dari ULN.

- a. Pengaruh ULN terhadap Tabungan Domestik. Hasil riset Griffin & Enos (1970), Rahman (1968), Chenery & Eckstein (1970) dan khususnya Weisskopf (1972) menunjukkan: dengan metode ekonometri tertentu ULN hanya sedikit berpengaruh terhadap produktivitas faktor-faktor produksi, sehingga justru mengurangi tabungan domestik.
- b. Pengaruh ULN terhadap penghasilan pajak (secara fiskal). Bila pengaruh administrasi dari peningkatan penerimaan pemerintah adalah positif, maka nilai ULN yang diterima negara yang bersangkutan mencapai optimalnya.
- c. Pengaruh ULN terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian Mosley, Hudson & Horrel (1987) dengan menggunakan data cross-section



menyimpulkan tidak ada bukti yang cukup kuat bahwa ULN meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

- d. Pengaruh terhadap pemberantasan kemiskinan. Hasil studi Cassen & Associates (1987) menjelaskan, ULN yang digunakan untuk program pengentasan kemiskinan akan berhasil bila dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
- Mensubsidi barang & jasa yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat miskin.
  - Membiayai secara kontinu proyek tersebut di atas.
  - Mengurangi intensitas modal dari proyek.
  - Mendorong riset-riset di bidang pertanian.

Yang perlu digarisbawahi adalah makna bantuan luar negeri itu sendiri dalam pandangan negara-negara donor sangat berbeda dengan makna dalam pandangan negara-negara berkembang sebagai negara penerima bantuan. Salah satu kritik utama terhadap bantuan luar negeri mengatakan bahwa hampir semua penyediaan bantuan tersebut didasarkan atas motif dan kepentingan negara-negara donor, bukan didasarkan atas kepentingan dan aspirasi negara-negara penerima bantuan. Pendapat penulis pribadi, "Sebagai bagian dari negara berdaulat harus waspada dan bila perlu secara tegas menolak ULN".

### **Perkembangan Aliran Modal Asing di NSB**

Perkembangan sumber-sumber keuangan internasional dewasa ini, yang perlu dicermati adalah timbulnya fenomena baru di negara-negara berkembang, terutama di negara-negara penghutang besar, yaitu beralihnya perhatian kepada bentuk alternatif bagi pembiayaan yang berasal dari pihak asing (modal asing). Dengan kata lain telah timbul kecenderungan kebijakan untuk mengurangi porsi hutang luar negeri (*foreign aid*) dan memperbesar porsi bentuk-bentuk alternatif pembiayaan jenis lainnya – sebagaimana yang telah penulis sebut di atas (Sritua Arief, 1998).

Sebagai contoh data, perkembangan *foreign direct investment* – di mana dana investasinya langsung digunakan untuk menjalankan kegiatan bisnis seperti: pembelian lahan, membuka pabrik-pabrik, mendatangkan mesin, membeli bahan baku, dan sebagainya – di negara-negara berkembang telah berlangsung sangat cepat. Pada tahun 60-an total nilai baru mencapai sekitar US\$ 2,4 miliar, maka di tahun

80-an nilainya melonjak menjadi US\$ 17 miliar, dan naik lagi menjadi US\$ 31 miliar pada tahun 1990, serta puncaknya pada tahun 1993 menjadi sebesar US\$ 80 miliar, lihat tabel 4 tentang perkembangan PMA di negara-negara berkembang (Todaro, 1998).

**Tabel 4. Perkembangan PMA di Negara-negara Berkembang tahun 1970-1993, serta Negara Penerima Utama Tahun 1982-1992 (dlm US\$ miliar)**

Tahun	FDI Netto	10 Negara Penerima FDI Terbesar	FDI yang masuk pada tahun 1988-1992
1970	3,1	China (RRC)	25,6
1980	10,9	Singapura	21,7
1990	31,0	Meksiko	18,4
1991	38,7	Malaysia	13,2
1992	42,5	Argentina	10,6
1993	80,0	Thailand	9,5
		Hongkong	7,9
		Brasil	7,6
		Taiwan	6,0
		Indonesia	5,6

**Sumber:** *United Nations Development Program (UNDP), Human Development Report, 1994 (New York: Oxford Univ. Press), diambil dari Todaro, 1998, p.146*

Perkembangan selanjutnya, arus modal asing dalam beberapa dasawarsa terakhir diwarnai dengan munculnya perusahaan-perusahaan raksasa, atau sering disebut *Multinational Corporations* (MNC). Pada dasarnya 'mereka' adalah *global factory* yang mampu dan selalu gigit mencari 'kesempatan-kesempatan' ekonomi di setiap penjuru dunia. Para MNC ini seringkali mendominasi berbagai komoditi dagang di negara-negara berkembang. Kenyataan yang 'mengejutkan' dari praktek para MNC ini adalah nilai penjualannya yang seringkali melebihi nilai GDP negara-negara berkembang di mana mereka beroperasi (lihat tabel 5).

Syarat-syarat itulah yang cenderung menjadi pertimbangan dari perusahaan-perusahaan global (MNC) dalam memutuskan berinvestasi atau tidak, dalam arti mengalirkan modalnya ke negara-negara berkembang. Beberapa negara yang memenuhi kriteria tersebut di atas, seperti China, Nigeria dan India, lebih dari 25 tahun menjadi pusat aliran modal asing (lihat tabel 6).

Perdebatan mengenai peran dari perusahaan-perusahaan raksasa (MNC) ini telah merebak di kalangan para ilmuwan sosial pengambil kebijakan, terutama mengenai **kontribusinya** terhadap pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Helleiner (1989) dalam *Handbook of Development Economics*, yakni telah terjadi perdebatan mengenai beberapa aspek, di antaranya: efek negatif yang ditimbulkan budaya Barat dan sistem pasar yang berlaku. Bahkan dikemukakan pula oleh Kumar (1980) bahwa muncul anggapan TNC sebagai “kendaraan kolonial” negara maju, di samping menyebabkan kerusakan sosial dan lingkungan.

## **PANDANGAN TEORITIS TENTANG ARGUMEN PRO DAN KONTRA TERHADAP MODAL ASING**

### **Argumen Pro (yang mendukung) Adanya Modal Asing**

“Kelompok” ini merupakan pendukung aliran neo-klasik, yang memusatkan perhatiannya terhadap berbagai faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Mereka berpendapat, bahwa modal asing (termasuk bantuan luar negeri) memberikan dampak positif terhadap perekonomian, di antaranya adalah: *satu*, dapat mengisi kekurangan (ketidakmampuan) tabungan domestik (baca **analisis Harrod-Domar tentang ‘kesenjangan tabungan-investasi’**) ; *kedua*, menambah cadangan devisa (baca *two-gap model analysis*) ; *ketiga*, memperbesar tabungan pemerintah; dan *keempat*, mengembangkan keahlian manajerial bagi perekonomian di negara penerimanya (Todaro, 1998: 151).

### **Argumen yang Menentang Adanya Modal Asing**

Alasan yang sangat kuat bagi “kaum” penentang modal asing ini adalah **semakin melebarnya bentuk kesenjangan** ! Alasan tersebut tidak semata-mata berdasar ‘kebencian’ si negara miskin terhadap si negara kaya, akan tetapi didukung dua argumen dasar (paling tidak), yaitu: *satu*, *argumen yang lebih bersifat ekonomis*. Terjadinya penurunan tabungan (investasi) merupakan faktor kuat dari argumen

ini. *Kedua, argumen yang bersifat ideologis (politis)*. Munculnya kekhawatiran bahwa kekuatan ekonomi para MNC berpengaruh pada keputusan-keputusan politis – seperti misalnya menyuap para pejabat/aparat korup untuk kepentingan mereka – pada semua tingkatan. Kasus di Chili pada tahun ‘70-an membuktikan hal tersebut, di mana pada saat itu perusahaan multinasional dari AS turut mendukung kekuatan militer Jendral Pinochet untuk meng-kudeta terhadap Presiden Salvador Allende yang hendak membawa Chili ke arah Sosialisme (Todaro, 1998 : 152-155).

### **DAMPAK FOREIGN CAPITAL INFLOWS**

Sebelum tahun 1980-an, strategi pembangunan konvensional yang dijalankan di kebanyakan negara berkembang banyak bertumpu pada toleransi terhadap defisit neraca transaksi berjalan (*current account*). Dari sinilah impor dilakukan secara leluasa. Sehingga sebagian besar pendapatan ekspor yang diperoleh dihabiskan untuk membiayai impor tersebut. Akan tetapi ketika impor terus bertambah, ternyata pendapatan ekspor tidak dapat menutupnya, sampai terciptalah defisit pada *current account*. Maka untuk menutup defisit ini negara-negara berkembang “memanfaatkan arus modal asing” – baik yang bersifat antar pemerintah maupun yang bersifat investasi langsung dari para MNC, serta dari lembaga keuangan internasional lain – untuk masuk ke negaranya.

Akan tetapi semenjak tahun 1980-an, kebanyakan negara berkembang tersebut mulai mengalami defisit transaksi berjalan sekaligus defisit neraca modalnya. Adapun penyebab kemerosotan posisi neraca transaksi berjalan di antaranya: *satu*, penurunan yang tajam atas harga-harga komoditi primer termasuk minyak; *kedua*, resesi global pada periode 1981-1982 dan 1991-1993 yang mengakibatkan penyusutan volume perdagangan dunia secara keseluruhan; *ketiga*, meningkatnya proteksionisme negara-negara maju terhadap ekspor dari negara-negara berkembang. Sedangkan defisit neraca modal lebih diakibatkan oleh: *lonjakan kewajiban pembayaran kembali utang LN NSB* ; *kemerosotan tajam dalam jumlah pemberian pinjaman baru oleh bank-bank internasional* ; *serta terjadinya capital flight secara besar-besaran*. (Todaro, 1998 : 111).

Secara keseluruhan, faktor tersebut di atas menjelaskan terjadinya pembalikan arus modal dari negara-negara berkembang ke negara-

negara maju (donor) secara besar-besaran. Proses inilah yang selanjutnya disebut sebagai repatriasi hasil modal asing, sekaligus ditandainya awal terjadinya “Krisis Utang Dunia Ketiga” (negara-negara berkembang) sebagai dampak derasnya *foreign capital inflows*.

Untuk kasus di Indonesia, berdasarkan data neraca pembayaran menunjukkan adanya perbandingan tekanan yang ditimbulkan, antara investasi asing dan utang luar negeri. Selama periode 1973-1990 ditunjukkan bahwa tekanan yang ditimbulkan oleh arus investasi asing jauh lebih berat dibandingkan dengan tekanan yang ditimbulkan oleh utang luar negeri terhadap neraca pembayaran (lihat tabel 7). Tekanan yang ditimbulkan oleh keuntungan investasi asing yang di-repatriasi keluar negeri terhadap transaksi berjalan sebesar US\$ 58.859 juta dibanding dengan tekanan yang ditimbulkan oleh pembayaran bunga utang luar negeri yaitu sebesar US\$ 21.733 juta. Perbandingan ini menunjukkan bahwa tekanan negatif yang diakibatkan investasi asing terhadap transaksi berjalan sebesar 2,7 kali lipat dari tekanan negatif yang ditimbulkan utang luar negeri (Sritua Arief, 1993).

Tabel 7. Komponen-komponen Tertentu dalam Neraca Pembayaran Indonesia, 1973-1990 (dlm juta US\$)

Th	Posisi Transaksi Berjalan	Pembayaran Bunga ULN	Keuntungan Investasi Asing yang direpatriasi ke LN	Cicilan ULN	Arus Masuk Investasi Asing	Arus Masuk ULN	Kolom (3) + Kolom (5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1973	- 476	- 62	- 629	- 149	+ 16	+ 909	- 211
1974	+ 598	- 80	- 1329	- 212	- 49	+ 1120	- 292
1975	- 1109	- 175	- 1385	- 348	+ 476	+ 2127	- 523
1976	- 910	- 327	- 1212	- 434	+ 344	+ 2332	- 761
1977	- 47	- 441	- 1685	- 821	+ 235	+ 1959	- 1262
1978	- 1407	- 514	- 1997	- 1548	+ 297	+ 2215	- 2062
1979	+ 976	- 771	- 2465	- 1332	+ 226	+ 1887	- 2103
1980	+ 3005	- 823	- 3327	- 939	+ 183	+ 1888	- 1762
1981	- 613	- 991	- 4162	- 1054	+ 133	+ 2672	- 2045
1982	- 5324	- 1132	- 4016	- 1104	+ 225	+ 3951	- 2236
1983	- 6338	- 1233	- 4281	- 1290	+ 292	+ 4979	- 2523
1984	- 1856	- 1629	- 4889	- 1600	+ 222	+ 3864	- 3229
1985	- 1923	- 1643	- 4310	- 2330	+ 310	+ 3569	- 3973

Lanjutan Tabel 7...

Th	Posisi Transaksi Berjalan	Pembayaran Bunga ULN	Keuntungan Investasi Asing yang direpatriasi ke LN	Cicilan ULN	Arus Masuk Investasi Asing	Arus Masuk ULN	Kolom (3) + Kolom (5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1986	- 3911	-2072	- 3948	- 2622	+ 258	+ 4244	- 4694
1987	- 2098	- 2273	- 4215	- 3406	+ 385	+ 5458	- 5679
1988	- 1397	- 2526	- 4584	- 4439	+ 576	+ 6439	- 6965
1989	- 1108	- 2501	- 5109	- 4343	+ 682	+ 6485	- 6844
1990	- 2369	- 2540	- 5316	- 4105	+ 964	+ 4611	- 6645
Jml	- 26307	- 21733	- 58859	- 32076	+ 5775	+ 60709	- 53809

Sumber: Balance of Payment yang diterbitkan IMF dan Laporan-laporan Bank Dunia berbagai tahun, (diambil dari Sritua Arief, 1993: 65)

## KESIMPULAN

Sungguh suatu dilema bagi kebanyakan negara berkembang (termasuk Indonesia) untuk mengatakan: “Tidak akan Berhutang” atau “Tidak Bergantung pada Investor Asing” pada kondisi sekarang ini.

Kenyataan bahwa dampak yang ditimbulkan atas derasnya arus modal asing – terutama ke negara-negara berkembang – *lebih banyak* memberikan akibat negatif (bila dilihat dari defisit neraca pembayaran), maka suatu “hipotesis ringan” yang dapat ditulis di sini adalah:

- Memberikan *pengetatan aturan* tentang *Foreign Capital Inflows* supaya tidak semakin menyebabkan memburuknya defisit anggaran (lihat artikel Sulistiowati & Tjahjono, 1998: Kebijakan Pengendalian Aliran Modal Masuk di Indonesia).
- Mengurangi (menghilangkan) struktur sektor industri yang banyak terdiri dari subsektor industri yang memproduksi *high-value added product* dan bersifat *non-resources based*. (Sritua Arief, 1993)
- Tidak membuka kesempatan kepemilikan 100% kepada investor asing !

## SUMBER BACAAN

- Arief, Sritua, 1993. *Pemikiran Pembangunan dan Kebijaksanaan Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Riset Pembangunan.
- \_\_\_\_\_, 1998. *Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia: Pemberdayaan Rakyat dalam Arus Globalisasi*, Bandung: Penerbit Zaman Wacana Mulia.
- Cardoso, E.A dan Dornbusch, R, 1989. "Foreign Private Capital Flows", *Handbook of Development Economics*, Vol.II, Publisher of Elsevier Science.
- Eaton, J, "Foreign Public Capital Flows", 1989. *Handbook of Development Economics*, Vol.II, North Holland: Publisher of Elsevier Science.
- Gazioglou, S dan McCausland, W.D, Tanpa tahun. "An International Economic Analysis of Foreign Direct Investment and International Indebtedness", *The Indian Economic Journal*, Vol. 48, No. 4.
- Helleiner, G.K, 1989. "Transnational Corporations and Direct Foreign Investment", *Handbook of Development Economics*, Vol.II, North Holland: Publisher of Elsevier Science.
- Marr, Ana, 1997. *Foreign Direct Investment Flows To Low-Income Countries: A Review of The Evidence*, Overseas Development Institute.
- Mudrajad, 1997. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*, edisi pertama, UPP AMP YKPN Press, Yogyakarta,
- Purnomo, D, 1999. "Sumber Pembiayaan Pembangunan di Indonesia", *Buletin Development*, Surakarta: diterbitkan oleh HMJ FE UMS, Vol. 1, no. 1.
- Rachbini, Didik, 2001. *Ekonomi Politik Utang: Penjelasan Teoritis-Historis atas Kebijakan Pembangunan Bertumpu pada Utang Luar Negeri*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sulistyowati, H dan Tjahyono, 1998. "Kebijakan Pengendalian Aliran Modal Masuk di Indonesia", *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Vol. 1, No. 3, Desember, h. 187-212.

- Suseno, T.W, 1990. *Indikator Ekonomi: Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, bab IV.
- Todaro, M, 1998. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, ed. 6 (terjemahan), Jakarta: Penerbit Erlangga.